

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU: ANALISIS KRITIS DALAM PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN MODERN DAN SIKLUS KEBIJAKAN

Arsyil Waritsman<sup>1</sup>, Tanwey Gerson Ratumanan<sup>2</sup>, Theresia Laurens<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Balai Diklat Keagamaan Ambon, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Ambon, Maluku, Indonesia

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku, Indonesia

Email: [arsyil.waritsman@gmail.com](mailto:arsyil.waritsman@gmail.com)

---

### Article History

Received: 13-05-2026

Revision: 24-05-2026

Accepted: 30-05-2026

Published: 07-06-2026

**Abstract.** This study aims to analyze the local excellence-based education policy in Maluku Provincial Regulation Number 7 of 2019 concerning the Implementation of Education. The background of the study is based on the importance of education that is not only oriented towards national standards, but also able to accommodate the social, cultural, and geographical characteristics of the island regions in Maluku Province. The local excellence-based education policy is seen as strategic for strengthening cultural identity, increasing the relevance of education, and supporting the development of regional human resources. This study uses a qualitative method with a public policy analysis approach. Data collection techniques were carried out through a documentation study of Maluku Provincial Regulation Number 7 of 2019 and various relevant education indicators. The analysis was conducted using modern policy theory, policy cycles, and critical analysis of education policy. The results of the study indicate that the local excellence-based education policy in Maluku has a progressive orientation because it integrates local culture, character education, local content curriculum, and the development of regional potential into the education system. However, the implementation of the policy still faces various challenges, such as unequal access to education in the island region, limited infrastructure, low teacher competency in local content development, weak integration of education with local economic needs, and suboptimal education governance and funding. This study concludes that the success of education based on local excellence requires strengthening the capacity for policy implementation, improving the quality of educational resources, and stronger integration between education, local culture, and regional development.

**Keywords:** Education Policy, Maluku, Local Excellence, Policy Theory

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis daerah kepulauan di Provinsi Maluku melalui kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk memperkuat identitas budaya, meningkatkan relevansi pendidikan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 serta berbagai indikator pendidikan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan teori kebijakan modern, siklus kebijakan, dan analisis kritis kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Maluku memiliki orientasi yang progresif karena mengintegrasikan budaya lokal, pendidikan karakter, kurikulum muatan lokal, dan pengembangan potensi daerah ke dalam sistem pendidikan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan di wilayah kepulauan, keterbatasan sarana prasarana, minimnya kompetensi guru dalam pengembangan muatan lokal, lemahnya integrasi pendidikan dengan kebutuhan ekonomi lokal, serta belum optimalnya tata kelola dan pendanaan pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan berbasis keunggulan lokal memerlukan penguatan kapasitas implementasi kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya pendidikan, serta integrasi yang lebih kuat antara pendidikan, budaya lokal, dan pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Keunggulan Lokal, Maluku, Teori Kebijakan

---

**How to Cite:** Waritsman, A., Ratumanan, T. G., & Laurens, T. (2026). Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Provinsi Maluku: Analisis Kritis dalam Perspektif Teori Kebijakan Modern dan Siklus Kebijakan. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 6 (3), 748-768. <http://doi.org/10.54373/ijset.v6i3.5763>

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan berbasis keunggulan lokal semakin memperoleh perhatian dalam diskursus kebijakan pendidikan kontemporer sebagai respons terhadap tuntutan globalisasi (Musanna, 2017), desentralisasi pendidikan (Sari & Yanti 2022), dan kebutuhan penguatan identitas sosial-budaya masyarakat lokal (Yunus et al., 2025). Di berbagai negara, kebijakan pendidikan tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen administratif untuk meningkatkan capaian akademik, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk membangun kapasitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat berbasis karakteristik wilayah masing-masing. Dalam konteks tersebut, pendidikan berbasis keunggulan lokal menjadi penting karena memungkinkan sistem pendidikan mengintegrasikan potensi daerah, nilai budaya, sumber daya alam, serta kebutuhan masyarakat lokal ke dalam proses pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pelestarian identitas lokal di tengah arus homogenisasi global.

Penguatan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Indonesia memperoleh legitimasi normatif melalui kebijakan desentralisasi pendidikan yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan pendidikan sesuai karakteristik wilayahnya. Otonomi daerah membuka peluang bagi setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, termasuk pengembangan muatan lokal dan pendidikan berbasis potensi daerah (Fitriyah et al., 2026). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari lemahnya integrasi kebijakan, keterbatasan kapasitas institusional, hingga belum optimalnya sinkronisasi antara tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan daerah. Dalam banyak kasus, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal masih bersifat normatif dan administratif, dan belum sepenuhnya menjadi kerangka strategis yang dapat mentransformasikan potensi lokal menjadi basis pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki keragaman budaya, potensi maritim, kekayaan sosial lokal, dan karakteristik geografis kepulauan yang unik. Kondisi tersebut menjadikan Maluku memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Karakteristik masyarakat kepulauan, distribusi layanan pendidikan yang tidak merata, tantangan aksesibilitas, dan kebutuhan penguatan identitas budaya lokal menuntut hadirnya kebijakan pendidikan yang kontekstual dan berbasis pada keunggulan lokal daerah. Dalam konteks inilah Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai instrumen regulatif untuk mendukung pengembangan pendidikan daerah, termasuk pendidikan berbasis

keunggulan lokal. Kebijakan tersebut merepresentasikan upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal, potensi sumber daya daerah, dan kebutuhan masyarakat Maluku ke dalam sistem pendidikan.

Keberadaan regulasi tersebut belum secara otomatis menjamin efektivitas kebijakan maupun relevansi implementasinya terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Berbagai studi tentang kebijakan pendidikan berbasis lokal menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi (Samhaji & Anggara, 2025; Widiastuti et al., 2025), aktor kebijakan (Anwar et al., 2025), partisipasi masyarakat (Mokodompit et al., 2025), konsistensi implementasi (Arafah et al., 2025), serta kesesuaian antara desain kebijakan dan realitas sosial daerah (Wika, 2025). Penelitian terdahulu mengenai kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Indonesia umumnya berfokus pada implementasi kurikulum muatan lokal (Luneto, 2021), pengembangan budaya sekolah (Harahap, 2023), dan penguatan karakter berbasis budaya daerah (Iswatiningsih, 2019). Sebagian penelitian juga mengkaji hubungan antara desentralisasi pendidikan dan pengembangan potensi lokal dalam kerangka otonomi daerah (Ridwan & Sumirat, 2021). Namun, kajian tersebut cenderung bersifat sektoral dan lebih banyak menitikberatkan pada aspek implementasi teknis dibandingkan analisis kebijakan secara komprehensif.

Studi mengenai kebijakan pendidikan di wilayah kepulauan seperti Maluku masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dengan pendekatan teori kebijakan modern dan analisis siklus kebijakan. Padahal, kompleksitas kebijakan pendidikan di daerah kepulauan memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya melihat kebijakan sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai proses politik, institusional, dan sosial yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Dalam perspektif teori sistem, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari interaksi antara lingkungan sosial, kebutuhan masyarakat, dan respons pemerintah. Sementara itu, teori institusional menekankan pentingnya struktur kelembagaan, norma, dan legitimasi dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Di sisi lain, teori pilihan rasional melihat kebijakan sebagai hasil kalkulasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga pendekatan tersebut memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku.

Di samping pendekatan teoritis tersebut, analisis berdasarkan siklus kebijakan juga penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dirumuskan, diimplementasikan, dievaluasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Siklus kebijakan memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsistensi antara agenda kebijakan, formulasi

regulasi, implementasi program, hingga evaluasi kebijakan dalam konteks pendidikan daerah. Pendekatan ini relevan karena banyak kebijakan pendidikan daerah di Indonesia menghadapi persoalan pada tahap implementasi dan evaluasi, meskipun secara normatif telah dirancang dengan baik. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang bersifat kritis dan reflektif diperlukan untuk mengungkap tidak hanya kekuatan kebijakan, tetapi juga berbagai keterbatasan, kontradiksi, dan tantangan struktural yang memengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku dalam perspektif teori kebijakan modern. Kedua, kajian yang mengintegrasikan analisis teori sistem, teori institusional, teori pilihan rasional, dan siklus kebijakan dalam satu kerangka analisis kebijakan pendidikan daerah masih sangat minim. Ketiga, penelitian terdahulu belum banyak mengintegrasikan data dan indikator pendidikan dalam analisis kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal secara kritis dan reflektif. Akibatnya, pemahaman mengenai efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di daerah kepulauan seperti Maluku masih belum komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku menggunakan tiga teori kebijakan modern, yaitu teori sistem, teori institusional, dan teori pilihan rasional. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kebijakan tersebut berdasarkan tahapan siklus kebijakan untuk memahami dinamika formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan daerah. Penelitian ini selanjutnya menilai kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku melalui pendekatan analisis kritis dengan mengintegrasikan data dan indikator pendidikan yang relevan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan pendidikan daerah dengan menawarkan pendekatan analisis multidimensional yang mengintegrasikan teori kebijakan modern dan siklus kebijakan dalam konteks pendidikan berbasis keunggulan lokal. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas literatur mengenai kebijakan pendidikan di wilayah kepulauan yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam studi kebijakan pendidikan Nasional. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan perumus kebijakan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan sesuai karakteristik sosial-budaya dan geografis Provinsi Maluku.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis kebijakan (*policy analysis research*) untuk mengkaji kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian difokuskan pada analisis substansi kebijakan, orientasi kebijakan, dan relevansinya terhadap kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat Maluku sebagai daerah kepulauan. Data penelitian terdiri atas data primer berupa dokumen regulasi utama dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan pendidikan, dan berbagai dokumen pendukung yang relevan dengan kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan pendidikan daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis kebijakan kritis (*critical policy analysis*). Penelitian ini menggunakan kerangka teori kebijakan modern yang meliputi teori sistem, teori institusional, dan teori pilihan rasional untuk menganalisis proses dan dinamika kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku. Selain itu, pendekatan siklus kebijakan (*policy cycle*) digunakan untuk mengkaji tahapan agenda kebijakan, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori agar hasil analisis lebih objektif, sistematis, dan mendalam dalam menilai efektivitas serta tantangan kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku.

## **HASIL**

### **Analisis Kebijakan berdasarkan Tiga Teori Kebijakan Modern**

Kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan bentuk kebijakan pendidikan daerah yang menempatkan budaya, nilai lokal, dan potensi daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini terlihat terutama pada pengaturan mengenai budaya daerah, kurikulum muatan lokal, dan pendidikan karakter, serta penyelenggaraan pendidikan berciri keunggulan lokal. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah bertujuan mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem, kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai suatu sistem yang saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dalam teori sistem, perubahan pada satu bagian sistem akan memengaruhi bagian lain dan keseluruhan sistem pendidikan (Adnan, 2018). Hal tersebut tampak dalam kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang tidak hanya mengatur kurikulum, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, sekolah, guru, masyarakat, pendanaan, dan budaya daerah sebagai bagian yang saling mendukung. Perda ini menempatkan pendidikan sebagai “satu sistem yang terintegrasi” untuk mencapai pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

Melalui Pasal 16, pemerintah daerah menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal sebagai media transformasi budaya pada setiap satuan pendidikan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum akan berdampak terhadap kebutuhan sumber daya manusia, penyediaan bahan ajar, pengembangan kompetensi guru, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pola partisipasi masyarakat. Sistem pendidikan dibangun dengan memasukkan budaya lokal sebagai input utama yang kemudian diproses melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing.

Integrasi budaya lokal dalam perspektif teori sistem juga terlihat pada pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang diarahkan pada kesenian daerah, olahraga tradisional, kewirausahaan berbasis lokal, pendidikan kebencanaan, dan pendidikan karakter. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem pendidikan daerah yang relevan dengan kondisi sosial budaya Maluku. Selain itu, adanya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sekolah, dan masyarakat menunjukkan adanya mekanisme pengelolaan sistem pendidikan secara terpadu. Pembentukan tim pengembangan kurikulum, pengawasan pendidikan, dan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi semakin memperlihatkan bahwa kebijakan ini disusun dalam kerangka sistem pendidikan yang saling berkaitan dan berkelanjutan.

Kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam Perda ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma sosial, dan struktur kelembagaan masyarakat Maluku. Teori institusional memandang bahwa kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan sosial (Muadi et al., 2016; Suriani et al., 2025). Dalam Perda ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan pembentukan karakter masyarakat.

Hal tersebut terlihat pada ketentuan bahwa setiap satuan pendidikan harus mencerminkan ciri khas lokal sesuai budaya daerah setempat. Pendidikan diarahkan untuk mentransformasikan nilai-nilai budaya, membentuk akhlak mulia, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis berdasarkan keberagaman. Dengan demikian, lembaga pendidikan menjadi institusi sosial yang berfungsi menjaga identitas budaya masyarakat Maluku.

Teori institusional juga terlihat dari penguatan kelembagaan pendidikan yang dilakukan melalui pembentukan dan penguatan berbagai institusi seperti Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LPMP, serta Tim Pengembangan Kurikulum. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Budaya lokal tidak hanya dipandang sebagai tradisi sosial, tetapi telah diinstitusionalisasikan ke dalam kebijakan resmi pemerintah daerah melalui kurikulum muatan lokal, penggunaan bahasa daerah, pengembangan seni budaya daerah, dan pendidikan karakter berbasis nilai budaya.

Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang yang besar untuk terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Perda memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan, memantau penyelenggaraan pendidikan, membantu pendanaan, dan menjadi bagian dari komite sekolah. Dalam perspektif teori institusional, partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dibentuk melalui hubungan antara institusi formal pemerintah dengan institusi sosial masyarakat yang hidup di lingkungan budaya Maluku. Sementara itu, jika dianalisis menggunakan teori pilihan rasional, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat dipahami sebagai strategi rasional pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Teori pilihan rasional menekankan bahwa pengambilan kebijakan dilakukan berdasarkan pertimbangan efisiensi, manfaat, dan pencapaian tujuan secara optimal (Sari et al., 2025).

Perda ini menegaskan bahwa pendidikan diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, terampil, dan mampu bersaing pada tingkat lokal maupun Nasional. Pemerintah daerah secara rasional memilih pengembangan pendidikan berbasis lokal karena dianggap sesuai dengan kondisi geografis dan potensi daerah Maluku yang berciri kepulauan dan kaya akan budaya lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dipandang mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat.

Pendekatan rasional juga terlihat pada penggunaan data dan sistem informasi pendidikan dalam perencanaan kebijakan. Pasal 31 menyebutkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pendidikan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dikelola melalui sistem

informasi pendidikan yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mengambil keputusan berdasarkan data mengenai tingkat partisipasi pendidikan, potensi sumber daya manusia, serta kondisi pendidikan di daerah. Selain itu, kebijakan ini juga memperlihatkan pertimbangan biaya dan manfaat. Pengembangan kurikulum muatan lokal dan kewirausahaan berbasis lokal memberikan manfaat jangka panjang karena peserta didik dibekali keterampilan yang sesuai dengan potensi daerahnya. Pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memahami budaya daerah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui keterampilan berbasis budaya dan lingkungan setempat. Perda ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah mengatur pembagian kewenangan, sistem pendanaan, supervisi, dan pengawasan pendidikan secara jelas. Hal tersebut menunjukkan adanya pendekatan rasional dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, dan pembangunan masyarakat Maluku. Melalui pendekatan teori sistem, teori institusional, dan teori pilihan rasional, dapat dipahami bahwa kebijakan ini dirancang secara terpadu dengan memperhatikan hubungan antar komponen pendidikan, pengaruh nilai dan kelembagaan sosial, serta pertimbangan rasional dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan daerah.

### **Hasil Analisis Kajian Berdasarkan Tahapan Siklus Kebijakan**

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 dapat dianalisis menggunakan pendekatan siklus kebijakan (*policy cycle*). Pendekatan ini memandang bahwa suatu kebijakan publik lahir melalui tahapan yang saling berkaitan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan revisi kebijakan. Dalam konteks Perda ini, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal lahir sebagai respons pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan pendidikan di Provinsi Maluku sekaligus sebagai upaya membangun pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan dan budaya lokal masyarakat Maluku.

Tahap pertama dalam siklus kebijakan adalah identifikasi masalah dan penetapan agenda (*agenda setting*). Pada tahap ini, pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di Provinsi Maluku. Dalam penjelasan umum Perda disebutkan bahwa masih terdapat berbagai masalah pendidikan seperti tingginya angka buta aksara, menurunnya

angka partisipasi sekolah, belum tercapainya standar pelayanan minimal pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pendidikan. Selain itu, kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pendidikan. Permasalahan tersebut kemudian menjadi isu strategis yang masuk dalam agenda pemerintah daerah karena pendidikan dipandang sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku dalam tahap *agenda setting* menyadari pentingnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada standar nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai budaya dan potensi lokal masyarakat Maluku. Oleh sebab itu, isu pelestarian budaya daerah, pembentukan karakter generasi muda, dan pengembangan keunggulan lokal dijadikan bagian penting dalam agenda kebijakan pendidikan daerah. Hal ini tampak dari tujuan penyelenggaraan pendidikan yang diarahkan untuk berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah. Dengan demikian, agenda kebijakan pendidikan di Maluku tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu pendidikan secara umum, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan karakter daerah.

Tahap kedua adalah perumusan kebijakan (*policy formulation*). Pada tahap ini, pemerintah daerah mulai merancang solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Perumusan kebijakan dilakukan dengan menyusun berbagai ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang mencakup kurikulum muatan lokal, pengembangan budaya daerah, pendidikan karakter, pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu guru, pendanaan pendidikan, serta partisipasi masyarakat.

Rumusan kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal terlihat jelas pada Pasal 16 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal sebagai media transformasi budaya pada setiap satuan pendidikan. Selain itu, dirumuskan pula kebijakan mengenai kurikulum muatan lokal yang mencakup pendidikan budaya daerah, pendidikan budi pekerti, pendidikan kejujuran dan antikorupsi, serta penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran muatan lokal. Pemerintah daerah juga merumuskan kebijakan ekstrakurikuler berbasis budaya dan potensi lokal seperti kesenian daerah, olahraga tradisional, kewirausahaan berbasis lokal, dan pendidikan kebencanaan. Perumusan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Maluku. Proses formulasi kebijakan juga tampak dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan nasional, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan, namun

tetap memberikan ruang bagi pengembangan karakteristik lokal daerah. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan merupakan kombinasi antara standar nasional dan kebutuhan lokal masyarakat Maluku.

Tahap ketiga adalah pengambilan keputusan kebijakan (*policy decision-making atau legitimation*). Pada tahap ini, rancangan kebijakan yang telah disusun kemudian dibahas dan disahkan menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah. Dalam Perda ini, legitimasi kebijakan dilakukan melalui persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Proses pengambilan keputusan ini penting karena memberikan dasar hukum dan legitimasi politik terhadap kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Dengan disahkannya Perda, maka seluruh ketentuan mengenai kurikulum muatan lokal, budaya daerah, pendidikan karakter, dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal menjadi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada tahap ini juga terlihat adanya dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal dan karakter daerah.

Tahap keempat adalah implementasi kebijakan (*policy implementation*). Pada tahap ini, kebijakan yang telah disahkan mulai dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait, terutama pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Implementasi kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam Perda ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan. Pelaksanaan kebijakan terlihat melalui penerapan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengajarkan muatan lokal, menyediakan materi kelokalan kurikulum, serta membentuk tim pengembangan kurikulum. Selain itu, implementasi kebijakan juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diarahkan pada pengembangan budaya daerah, kewirausahaan berbasis lokal, pendidikan karakter, dan penguatan rasa kebangsaan (*patriotisme*). Pemerintah daerah bahkan menyelenggarakan kompetisi untuk mendukung pengembangan kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

Implementasi kebijakan juga melibatkan masyarakat melalui peran komite sekolah, dewan pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Masyarakat diberikan ruang untuk ikut memantau, dan membantu pendanaan, serta mendukung pengembangan pendidikan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan dalam Perda ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan daerah.

Tahap kelima adalah evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal telah mencapai tujuan yang diharapkan melalui pembinaan, pengawasan, supervisi, penjaminan mutu pendidikan, akreditasi sekolah, serta pemantauan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Pemerintah daerah juga memanfaatkan data dan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi untuk mendukung evaluasi secara administratif dan substantif, sehingga dapat diketahui berbagai hambatan implementasi, seperti keterbatasan guru muatan lokal, sarana pendidikan, pendanaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat, sekaligus mengukur efektivitas kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan, melestarikan budaya daerah, dan membentuk generasi yang berkarakter.

Tahap terakhir adalah umpan balik, revisi, dan pembelajaran kebijakan (*feedback, revision, and policy learning*). Dalam tahap ini, hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kebijakan pendidikan di masa mendatang. Perda ini sendiri memberikan ruang untuk penyusunan peraturan pelaksana lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan implementasi di lapangan. Umpan balik dari masyarakat, sekolah, guru, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi sumber pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Misalnya, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal atau kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, maka pemerintah daerah dapat melakukan revisi terhadap strategi implementasi, peningkatan pelatihan guru, atau penyempurnaan materi pembelajaran lokal. Selain itu, perkembangan sosial, budaya, dan teknologi juga memungkinkan kebijakan pendidikan terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan identitas budaya daerah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam Perda ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap proses pembelajaran kebijakan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan siklus kebijakan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan kebijakan yang lahir dari identifikasi persoalan pendidikan daerah, dirumuskan sebagai solusi berbasis budaya dan potensi lokal, disahkan melalui legitimasi politik, diimplementasikan melalui berbagai program pendidikan, dievaluasi melalui sistem pengawasan dan penjaminan mutu, serta terus dikembangkan melalui proses umpan balik dan pembelajaran kebijakan. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjaga identitas budaya dan karakter masyarakat Maluku.

## **Penilaian Kebijakan melalui Pendekatan Analisis Kritis**

Kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 pada dasarnya merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pendidikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis daerah kepulauan Maluku. Kebijakan ini menempatkan budaya lokal, nilai kearifan daerah, dan potensi masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan melalui kurikulum muatan lokal, pendidikan karakter, serta pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya dan kewirausahaan lokal. Namun, apabila dianalisis secara kritis dengan menggunakan indikator pendidikan yang relevan, terlihat bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural, administratif, dan kualitas pendidikan yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Secara normatif, kebijakan ini memiliki orientasi yang progresif karena berupaya menjadikan pendidikan sebagai instrumen pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. Pemerintah Provinsi Maluku menyadari bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya masyarakat Maluku yang plural dan berciri kepulauan. Oleh karena itu, Perda menegaskan pentingnya kurikulum muatan lokal, penggunaan bahasa daerah, pengembangan seni budaya daerah, serta pendidikan berbasis karakter dan akhlak mulia. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan modern tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembangunan karakter dan pelestarian budaya lokal.

Meskipun demikian, dari perspektif analisis kritis, terdapat persoalan mendasar terkait kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasinya. Salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan pemerataan akses pendidikan. Dalam penjelasan umum Perda disebutkan bahwa salah satu masalah utama pendidikan di Maluku adalah masih tingginya angka buta aksara dan menurunnya angka partisipasi sekolah. Kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menyebabkan banyak daerah terpencil mengalami keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan. Hal ini berdampak pada ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah di Provinsi Maluku.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Akan tetapi, implementasi kebijakan sering kali masih bersifat administratif dan simbolik. Banyak sekolah belum memiliki kurikulum muatan lokal yang benar-benar dikembangkan berdasarkan potensi daerah masing-masing. Muatan lokal di beberapa sekolah berpotensi hanya menjadi pelengkap administratif tanpa integrasi yang kuat dalam proses pembelajaran. Akibatnya, tujuan

pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk membangun kompetensi peserta didik yang sesuai dengan potensi daerah belum sepenuhnya tercapai.

Indikator kualitas pendidikan juga menunjukkan tantangan yang cukup serius. Dalam Perda disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin mutu pendidikan melalui pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Namun secara kritis dapat dinilai bahwa kualitas sarana dan prasarana pendidikan di banyak wilayah Maluku masih belum memadai. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet, serta tenaga pendidik yang kompeten. Kondisi ini menyebabkan implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal tidak berjalan optimal karena sekolah lebih fokus memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dibanding mengembangkan inovasi pembelajaran lokal. Selain itu, indikator kualitas sumber daya manusia pendidikan juga menjadi persoalan penting. Perda memang mengatur bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten untuk mengajarkan muatan lokal. Namun dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan guru yang memiliki kompetensi khusus di bidang budaya lokal, bahasa daerah, seni tradisional, atau kewirausahaan berbasis lokal. Banyak guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional dan belum memiliki pelatihan khusus mengenai pendidikan berbasis keunggulan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan kapasitas sumber daya manusia.

Dari sisi relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebenarnya memiliki nilai strategis yang tinggi. Maluku memiliki potensi besar di bidang kelautan, perikanan, pariwisata budaya, ekonomi kreatif, dan kerajinan lokal. Apabila kebijakan ini diimplementasikan secara serius, pendidikan dapat menjadi sarana pengembangan keterampilan berbasis potensi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun secara kritis dapat dilihat bahwa kurikulum pendidikan di banyak sekolah masih cenderung berorientasi pada standar nasional yang bersifat umum dan belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan ekonomi lokal masyarakat kepulauan. Sebagai contoh, pendidikan kewirausahaan berbasis lokal yang disebutkan dalam Perda belum secara optimal dikembangkan menjadi program vokasional yang terintegrasi dengan potensi ekonomi daerah seperti pengolahan hasil laut, industri kreatif budaya, atau pengembangan wisata bahari. Akibatnya, lulusan pendidikan menengah di Maluku masih menghadapi keterbatasan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran usia muda dan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal.

Analisis kritis juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal masih menghadapi persoalan tata kelola dan koordinasi. Perda mengatur adanya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga pendidikan dan pemerintah daerah belum selalu berjalan efektif. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan, keterbatasan pendanaan, dan lemahnya sistem monitoring terhadap implementasi kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah. Dari aspek pendanaan, Perda memang mengatur alokasi minimal 20% APBD untuk pendidikan. Akan tetapi, secara kritis perlu dipertanyakan sejauh mana alokasi tersebut benar-benar diarahkan untuk mendukung pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Sebagian besar anggaran pendidikan daerah umumnya masih terserap untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan operasional sekolah, sementara pengembangan inovasi kurikulum lokal, pelatihan guru, dan pengembangan bahan ajar budaya lokal masih relatif terbatas.

Di sisi lain, kebijakan ini memiliki kekuatan penting dalam aspek pelestarian budaya dan penguatan identitas sosial masyarakat Maluku. Pendidikan berbasis budaya lokal berpotensi memperkuat rasa kebersamaan, toleransi, dan semangat Siwalima sebagai nilai sosial masyarakat Maluku. Dalam konteks masyarakat multikultural dan pasca konflik sosial, pendidikan berbasis nilai budaya lokal dapat menjadi instrumen penting untuk membangun rekonsiliasi sosial dan karakter generasi muda. Oleh karena itu, secara substantif kebijakan ini memiliki nilai strategis yang tidak hanya bersifat pendidikan, tetapi juga sosial dan kultural.

Penilaian kritis terhadap kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki visi yang kuat dan progresif dalam mengintegrasikan pendidikan dengan budaya dan potensi daerah. Namun efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kualitas sarana dan prasarana, keterbatasan kompetensi guru, lemahnya integrasi kurikulum lokal dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya tata kelola dan pendanaan pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ini ke depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas implementasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan, memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan, serta menjadikan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagai bagian nyata dari pembangunan daerah Maluku yang berkelanjutan.

## **DISKUSI**

Kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku merupakan bentuk kebijakan desentralisasi pendidikan yang bertujuan mengintegrasikan sistem pendidikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis daerah. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjadikan pendidikan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia sekaligus sarana pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media transformasi nilai budaya, pembentukan karakter, dan penguatan identitas masyarakat Maluku.

Secara konseptual, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Maluku sejalan dengan paradigma pendidikan kontekstual yang menempatkan lingkungan sosial budaya peserta didik sebagai bagian penting dari proses pembelajaran (Septarinjani et al., 2025; Warpala, 2019). Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengurangi dominasi pendekatan pendidikan yang bersifat sentralistik dan seragam dengan memberikan ruang terhadap pengembangan nilai lokal, budaya daerah, dan kebutuhan masyarakat kepulauan. Dalam Perda ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berbasis pada nilai budaya, akhlak mulia, dan keunggulan lokal daerah sebagai bagian dari pembangunan pendidikan yang berorientasi mutu. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku masih menghadapi kesenjangan antara orientasi normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, kebijakan ini telah mengakomodasi berbagai dimensi penting seperti kurikulum muatan lokal, pengembangan budaya daerah, pendidikan karakter, kewirausahaan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Akan tetapi, implementasi kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Permasalahan pertama yang paling menonjol adalah ketimpangan akses pendidikan akibat kondisi geografis Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Kondisi ini menyebabkan distribusi layanan pendidikan tidak merata, terutama di daerah terpencil dan terluar. Dalam penjelasan umum Perda disebutkan bahwa rendahnya aksesibilitas pendidikan dan belum optimalnya sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu masalah utama pembangunan pendidikan di Maluku. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal karena sekolah-sekolah di wilayah terpencil masih menghadapi persoalan dasar seperti keterbatasan ruang belajar, minimnya fasilitas pembelajaran, rendahnya akses teknologi informasi, dan kekurangan tenaga pendidik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan berbasis lokal tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas implementasi kebijakan di tingkat lokal (Indriaty et al., 2025; Muchid et al., 2026). Ketimpangan geografis menyebabkan kemampuan sekolah dalam mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis lokal menjadi berbeda-beda. Sekolah di wilayah perkotaan relatif lebih mampu mengembangkan program budaya lokal dan kewirausahaan dibanding sekolah di daerah kepulauan terpencil yang masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia pendidikan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi kebijakan (Kusumaningrum et al., 2024; Nurdiana, 2023). Perda mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan berbasis budaya daerah. Akan tetapi, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang memadai dalam mengembangkan pembelajaran berbasis keunggulan lokal. Kondisi ini menyebabkan muatan lokal di banyak sekolah belum berkembang sebagai proses pembelajaran yang kontekstual, melainkan hanya menjadi pelengkap administratif kurikulum.

Keterbatasan kapasitas guru tersebut juga berkaitan dengan minimnya pelatihan dan pengembangan profesional yang secara khusus diarahkan pada pendidikan berbasis budaya lokal. Padahal, dalam konteks pendidikan berbasis keunggulan lokal, guru memiliki peran strategis sebagai agen transformasi budaya dan pengembang pembelajaran kontekstual. Tanpa dukungan kompetensi yang memadai, implementasi kebijakan cenderung bersifat formalistik dan tidak mampu menghasilkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dari sisi relevansi pendidikan, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebenarnya memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Maluku memiliki sumber daya lokal yang sangat kaya, terutama pada sektor kelautan, perikanan, pariwisata budaya, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pendidikan berbasis lokal seharusnya dapat diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kepulauan. Dalam Perda disebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat dikembangkan dalam bentuk kewirausahaan berbasis lokal dan pengembangan keterampilan peserta didik.

Namun secara empiris, hubungan antara pendidikan dan kebutuhan ekonomi lokal belum sepenuhnya terintegrasi. Kurikulum pendidikan masih lebih dominan berorientasi pada pencapaian akademik dan standar nasional dibanding pengembangan kompetensi berbasis potensi daerah. Akibatnya, lulusan sekolah menengah di Maluku sering kali belum memiliki

keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dengan implementasi kurikulum di tingkat sekolah.

Persoalan lain yang juga penting adalah lemahnya tata kelola kebijakan pendidikan berbasis lokal. Secara regulatif, Perda telah mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, implementasi koordinasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala birokrasi dan kelembagaan. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan muatan lokal di sekolah juga belum berjalan optimal sehingga sulit mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari aspek pendanaan, alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD sebagaimana diatur dalam Perda menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan pendidikan. Namun secara kritis dapat dinilai bahwa alokasi anggaran tersebut sebagian besar masih terserap untuk kebutuhan rutin seperti belanja pegawai dan operasional sekolah. Sementara itu, dukungan anggaran untuk pengembangan inovasi pembelajaran berbasis lokal, pelatihan guru muatan lokal, pengembangan bahan ajar budaya daerah, dan penguatan kapasitas sekolah masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal belum berkembang secara maksimal. Meskipun demikian, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku tetap memiliki signifikansi strategis dalam konteks pembangunan sosial budaya daerah. Pendidikan berbasis budaya lokal berpotensi memperkuat identitas masyarakat Maluku yang multikultural sekaligus menjaga nilai-nilai sosial seperti toleransi, solidaritas, dan semangat Siwalima. Dalam konteks masyarakat pasca konflik sosial, pendidikan berbasis budaya lokal juga dapat berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi sosial dan penguatan kohesi masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku dapat dipahami sebagai kebijakan yang memiliki visi transformasional, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan institusional yang cukup kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas implementasi kebijakan melalui peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual, pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan integrasi pendidikan dengan kebutuhan ekonomi lokal masyarakat Maluku. Dalam konteks pembangunan pendidikan daerah, keberhasilan kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi atau muatan lokal dalam kurikulum, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

memperkuat identitas budaya, serta menciptakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat daerah. Implikasinya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilakukan secara konsisten dan terintegrasi agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan masyarakat daerah secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 merupakan kebijakan yang memiliki visi strategis dan progresif dalam mengintegrasikan pendidikan dengan nilai budaya, karakter sosial, serta potensi lokal daerah sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan beridentitas daerah. Secara konseptual, kebijakan ini telah menunjukkan arah yang tepat karena mampu menempatkan pendidikan sebagai instrumen pembangunan sekaligus pelestarian budaya lokal. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan akses pendidikan akibat kondisi geografis kepulauan, keterbatasan kualitas dan distribusi tenaga pendidik, belum optimalnya integrasi kurikulum lokal dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, lemahnya tata kelola implementasi, serta keterbatasan dukungan anggaran untuk inovasi pendidikan berbasis lokal. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini ke depan sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas implementasi, meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, serta memastikan bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial, budaya, dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis yang dilakukan masih bersifat normatif dan belum didukung oleh data empiris lapangan secara menyeluruh terkait efektivitas implementasi kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di berbagai wilayah kepulauan Provinsi Maluku.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Provinsi Maluku, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan pendidikan daerah yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada karakteristik wilayah kepulauan. Pemerintah Provinsi Maluku perlu melakukan penyempurnaan terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

melalui penguatan regulasi turunan, pedoman teknis, serta integrasi yang lebih sistematis antara pendidikan berbasis keunggulan lokal dengan kurikulum pendidikan daerah. Kebijakan pendidikan juga perlu diarahkan pada pengembangan potensi maritim, budaya lokal, dan kearifan masyarakat Maluku sebagai identitas pendidikan daerah yang berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat adat, akademisi, dan sektor swasta dalam mendukung implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan melalui dukungan infrastruktur, penguatan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi pendidikan yang sesuai dengan kondisi geografis Maluku. Di sisi lain, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan indikator pendidikan yang terukur agar implementasi kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Secara akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal pada tingkat sekolah atau kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Penelitian mendatang juga dapat memperluas pendekatan analisis dengan mengintegrasikan perspektif partisipasi masyarakat, tata kelola pendidikan, maupun pendekatan evaluasi kebijakan berbasis data kuantitatif sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di daerah kepulauan.

## REFERENSI

- Adnan. (2018). Pendekatan Sistem dalam Pendidikan. *Edupedia*, 3(1), 99–108. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v3i1.324>
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, H., Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2025). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial. *Journal of Education Research*, 6(3), 739–750. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2576>
- Arafah, M., Akib, H., & Yamin, M. N. (2025). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Wilayah Pesisir: Studi Kasus Program Kelas Perahu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Riset Ilmu Sosial*. <https://www.ejurnal.teraskampus.id/index.php/simetris/article/view/417>
- Fitriyah, S. N., Hadi, S., & Dewi, R. S. I. (2026). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan pada Tingkat Sekolah Dasar: Kajian Implementasi dan Implikasi terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 482–499. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.5243>

- Harahap, R. (2023). Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 582–591. <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i3.1937>
- Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial dan Budaya. *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 551–565. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1258>
- Iswatiningsih, D. (2019). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Sekolah. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 3(2), 155–164. <https://doi.org/10.22219/satwika.v3i2.10244>
- Kusumaningrum, H., Hakim, A. R., Rajab, A. R. N., & Kiram, R. F. (2024). Implementasi Model Manajemen Strategik Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4(3), 115–127. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1577>
- Luneto, B. (2021). Kebijakan Penerapan Muatan Lokal Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus tentang Pengajaran Kearifan Lokal di SMA Kabupaten Boalemo). *Irfani*, 16(2), 70–87. <https://doi.org/10.30603/ir.v16i2.2105>
- Mokodompit, M., Abubakar, A., Bagea, I., & Fatmawati, T. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Pendidikan: Eksplorasi pada Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, dan Tantangan Sosial Ekonomi. *Journal of Leadership: Management and Policy in Education*, 2(2), 114–124. <https://doi.org/10.51454/jlmpedu.v2i2.1004>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muchid, M., & Utami, A. T. (2026). Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis pada Level Sekolah Menengah Atas Pertama Negeri di Pulau Bengkalis. *Jurnal Niara*, 18(3), 783–793. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/32050>
- Musanna, A. (2017). Indigenisasi Pendidikan: Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 117–133. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.529>
- Nurdiana, A. (2023). Peran Kepemimpinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di STAI Siliwangi Garut. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 278–286. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.127>
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jawara*, 7(1), 87–110. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/11611/7400>
- Samhaji, S., & Anggara, F. D. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan pada Daerah Tertinggal Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(2), 99–112. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i2.839>
- Sari, E. M., Lastrioza, L., Hadiyanto, H., & Irsyad, I. (2025). Analisis Rasionalitas dan Efektivitas Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah di SMPN 1 Kecamatan Guguak. *Jurnal Kepemimpinan dan Kepengurusan Sekolah*, 10(4), 2353–2363. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/1219>
- Sari, N., & Yanti, S. F. (2022). Sejarah Lokal dan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(2), 114–132. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/view/1640>
- Septarinjani, H., Amelia, S., Efendi, R., Oktara, T. W., & Delano, V. (2025). Integrasi Psikologi Pendidikan dan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Pembelajaran Kontekstual. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 9(2), 144–156. <https://doi.org/10.30653/001.202592.505>

- Suriani, R., Saputra, E., Sintha, M., & Aprillina, I. (2025). *Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Warpala, I. W. S. (2019). Pembelajaran Kontekstual: Sebuah Inovasi Penerapan Pendidikan Multikultural dan Belajar untuk Penemuan. *Media Edukasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 21–27. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jmk/article/view/729>
- Widiastuti, W., & Purnamaningsih, I. R. (2025). Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Digital: Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pendidikan terhadap Kinerja Akademik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Development*, 13(1), 161-173. <https://doi.org/10.53978/jd.v13i1.572>
- Wika, M. (2025). Antara Komitmen dan Realita: Studi Kualitatif terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Terpencil Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 89–96. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.376>
- Yunus, R., Kamuli, S., & Midu, F. A. (2025). Pendidikan Karakter Bagi Siswa Berbasis Kearifan Lokal di SMA Negeri 1 Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(3), 37–48. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1640>